

Kelemahan di Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Sekolah Dasar

Syahnaz Mayla Nissa¹, Mutiya Arninda Hasibuan², Ayu Fadhilah Yunanda³, Enjel Ika Barus⁴, Gabriel Christophher Simanjuntak⁵

¹²³⁴⁵Mahasiswa Program Studi Perguruan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan

e-mail: shanzmaylan@gmail.com, mutiaarnindahasibuan@gmail.com,
ayufadhilahyunandaa@gmail.com, ikaenjel64@gmail.com,
christhoppersimanjuntak@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membahas secara mendalam tentang kendala-kendala yang dialami guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter siswa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data adalah studi literatur dan observasi. Analisis data menggunakan analisis data interaktif. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sehingga tidak dipungkiri bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat berperan dalam membangun warga negara yang baik. Alasannya banyak seperti kognitif-berat, kurangnya kompetensi guru, pengajaran menekankan pada pengetahuan kewarganegaraan, tetapi tidak pada keterampilan dan disposisi kewarganegaraan. Metode ceramah dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih sangat kurang berarti dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan kolaborasi antar metode pembelajaran Keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode ini masih sangat kurang, di dalam metode tersebut interaksi sangat jarang ditemui. Fenomena ini menjadi penghalang untuk memunculkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

Kata kunci: *Kendala Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter Siswa, Kelemahan Pendidikan Kewarganegaraan*

Abstract

This research aims to discuss in depth the obstacles experienced by Citizenship Education teachers in building student character. This type of research is qualitative. Data collection methods are literature study and observation. Data analysis uses interactive data analysis. Citizenship Education is learning that must be given to students from elementary school to university, so it cannot be denied that Citizenship Education

plays a very important role in developing good citizens. The reasons are many such as cognitive-heavy, lack of teacher competence, teaching emphasizes civic knowledge, but not civic skills and dispositions. The lecture method in the Citizenship Education learning process is still very insignificant in achieving learning objectives, so collaboration between learning methods is needed. The involvement of students in the learning process using this method is still very lacking, in this method interaction is very rarely found. This phenomenon becomes a barrier to realizing the potential possessed by students.

Keywords : *Obstacles to Citizenship Education, Student Character, Weaknesses of Citizenship Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar memiliki arti penting bagi siswa pada pembentukan pribadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Depdiknas, 2006:97-104).

Peran guru untuk membekali dan mengembangkan nilai sikap dan moral pada diri siswa di sekolah dasar tentu sangat diperlukan. Namun pengembangan nilai sikap dan moral pada diri siswa mustahil untuk dicapai apabila siswa tidak memahami konsep konsep tentang nilai dan moral itu sendiri. Konsep tentang nilai sikap dan moral sesungguhnya telah termuat di dalam ruang lingkup mata pelajaran PKn fokus terhadap terbentuknya warga negara yang paham dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang terampil, cerdas serta berkarakter sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Undang-Undang yang sesuai dengan Pendidikan Kewarganegaraan Sistem Pendidikan Nasional merupakan mata ajaran wajib bagi seluruh peserta didik disemua jalur dan jenjang Pendidikan formal. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Civis Education juga seyogyanya diberikan kepada setiap warga negara Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara yang dapat diandalkan oleh pribadinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya dalam mencapai cita-cita bersama (Rahayu, 2007).

Untuk membentuk warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang strategis dan penting, yaitu dalam membentuk siswa maupun sikap dalam berperilaku sehari-hari, sehingga diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Minat belajar siswa pada bidang PKn ini perlu mendapat perhatian khusus karena minat merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan proses belajar. Di samping itu minat yang timbul dari kebutuhan siswa merupakan faktor penting bagi siswa dalam melaksanakan kegiatankegiatan-kegiatan atau usaha-usahanya (Susanto, 2013).

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diharapkan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Madiung, 2018). Guru mata pelajaran PKn sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) tidak hanya berperan dalam upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai baik yang bermanfaat bagi peserta didik dalam membangun karakter. Akan tetapi juga harus mampu mengajarkan PKn dalam bingkai perspektif global. Pentingnya PPKn global didasarkan atas dua alasan penting yakni pertama, meningkatnya populasi imigran yang menyebabkan keberagaman bahasa, budaya, dan etnis. Kedua, globalisasi telah meningkatkan keterkaitan antar negara-negara, terutama di bidang keamanan, ekonomi, budaya, teknologi, kesehatan dan perdamaian.

Dalam konteks ini para guru harus berkompeten untuk mendidik peserta didik secara intelektual dan moral untuk mengkritisi isu-isu global yang kompleks dan kontroversial dan bertindak sebagai warga global yang bertanggung jawab untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan serta mempromosikan pemikiran holistik dan pemahaman lintas budaya. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, guru PPKn berperan dalam pembentukan sumber daya manusia seutuhnya. Hal ini sejalan dengan Branson dalam Mulyono (2017:220) bahwa PKn berfungsi untuk membentuk karakter kewarganegaraan, seperti menjadi anggota masyarakat yang independen, memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu, berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Untuk mewujudkannya maka seorang guru PKn harus mampu mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang akan memungkinkan mereka untuk berfungsi dalam masyarakat global atau abad ke-21.

Reynolds, dkk (2017:10), mengemukakan bahwa di abad ke-21 guru memiliki tantangan dan tanggung jawab kepada peserta didik untuk membekali pengetahuan yang berkaitan dengan isu-isu yang berkembang pada tataran global. Guru harus mampu mengadopsi isu global ke dalam praktik pembelajaran kelas, mengapresiasi perbedaan kultur serta mampu mengembangkan resolusi konflik atas dasar prinsip keadilan. Berkaca dari uraian tersebut guru memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan pembentukan karakter peserta didik.

METODE

Jenis metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif yang terdiri dari 4 tahap antara lain: "(1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan (4) penarikan kesimpulan".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dasar adalah sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran yang dalam pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945.

Menurut UU sisdiknas No.20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai dengan membentuk kemampuan individu mengembangkan dirinya, serta kemampuan-kemampuan itu berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai seorang individu, maupun sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Depdiknas (2006:49) tujuan pembelajaran PKn adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut: "(1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain; (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi".

Secara umum menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) bahwa tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civics intelligence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics responsibility), dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat di simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari-hari.

Secara khusus tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Peran guru PKn dalam membangun karakter bangsa sebagai respons dan tantangan abad ke-21

Fullan dan Scott (2014: 6) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan proses untuk mengembangkan kualitas individu menjadi pribadi yang efektif, ulet, tekun, tahan, handal dan jujur. Sejalan dengan definisi tersebut Irawatie, dkk (2019: 35) menyebutkan bahwa program pendidikan karakter fokus pada pembangunan sosial, emosional dan personal. Dalam program ini peserta didik belajar menghargai diri sendiri, menghormati orang lain, bertanggung jawab, bekerjasama dengan orang lain, memecahkan sebuah permasalahan, jujur, dan dapat dipercaya. Karakter yang baik tidak terbentuk secara otomatis, akan tetapi dikembangkan dari waktu ke waktu melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan.

Untuk itu, pendidikan karakter penting diajarkan kepada peserta didik dan sekolah harus mengeksplicitkannya ke dalam kurikulum. Kebijakan pendidikan harus mengaktualisasikan dalam proses pembelajaran. Muttaqin dkk, (2018: 110) menyatakan bahwa secara bersama-sama orang tua, guru, administrator dan stakeholder harus bergabung untuk mendorong peserta didik mewujudkan nilai-nilai yang baik dalam hidup mereka. Pendidikan karakter berusaha untuk membantu peserta didik berkembang menjadi orang yang penuh dengan kebajikan (Irawatie dkk, 2019: 29). Hal tersebut senada dengan pendapat Umami, dkk. (2019: 379), bahwa salah satu tujuan diajarkannya pendidikan karakter di persekolahan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan perilaku luhur yang penuh dengan nilai-nilai kebajikan yang bisa digunakan untuk berpartisipasi di dunia global.

Prospek PPKn untuk membangun karakter bangsa menduduki posisi yang sangat sentral. PPKn merupakan upaya pedagogis untuk membentuk warga negara yang baik, yakni memiliki penalaran moral untuk bertindak atau tidak bertindak dalam urusan publik maupun privat. PPKn tidak dapat dilepaskan dari perspektif moralitas dan keutuhan pembangunan karakter warga negara (Singh, 2019: 2).

Secara objektif dari sudut pandang keilmuan, PPKn memiliki porsi yang besar untuk pembangunan karakter warga negara. Akan tetapi sejarah mencatat bahwa dinamika PPKn pada fasenya sebagai pendidikan moral yang dalam kurikulum formal dikenal sebagai Pendidikan Moral Pancasila (PMP) gagal dalam mengembankan pendidikan nilai. Pada fase tersebut, secara substantif tidak benar-benar sebagai pendidikan moral, akan tetapi lebih menekankan pada moralitas privat dan cenderung mengabaikan persoalan etika publik, seperti kasus korupsi, penyelewengan dan

penyalahgunaan kekuasaan, hegemoni ekonomi oleh kaum konglomerat dan sebagainya. Output proses pembelajaran cenderung menekankan pada hafalan verbal.

Paradigma baru PPKn mengalami transformasi dalam beberapa aspek seperti, visi, misi, substansi materi, dan strategi pengajaran. Di sisi lain, adanya upaya untuk mengembalikan PPKn ke dalam jalur ilmu sebagai bidang kajian terbuka dan independen dari intervensi kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Dengan paradigma baru tersebut, PPKn diharapkan mampu berperan dalam merekonstruksi persoalan yang muncul pada abad 21 melalui pembelajaran pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai-nilai kewarganegaraan (civic values), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skills).

Seiring berjalannya waktu, PPKn mulai menampakkan jati dirinya. Struktur keilmuan PPKn dilihat dari aspek kompetensi, evaluasi, strategi, metode telah menampakkan karakter yang jauh lebih ideal daripada fase sebelumnya. Dalam Kurikulum 2013 (K-13), aspek pembentukan karakter peserta didik sangat diperhatikan. K-13 mengamanatkan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan domain sikap, pengetahuan dan keterampilan yang selanjutnya dituangkan ke dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL), baik tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK. Dari Standar Kompetensi Lulusan tersebut diuraikan dalam Kompetensi Inti (KI) yang terdiri dari KI sikap spiritual, KI sikap sosial, KI pengetahuan, dan KI keterampilan. Selanjutnya Kompetensi Inti dijabarkan ke dalam Kompetensi Dasar yang meliputi KD yang berasal dari sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam K-13 aspek pembentukan sikap lebih diprioritaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari ciri K-13 bahwa selalu mengaitkan antar sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam satu konteks pembelajaran. Dengan demikian, dalam satu proses pembelajaran peserta didik akan mengembangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara bersama-sama. Hal tersebut mengandung makna bahwa dalam K13 akan terbangun pendidikan karakter secara otomatis, karena penanaman nilai-nilai karakter terintegrasi dalam setiap proses pembelajaran (Muttaqin dkk, 2018: 105).

Tugas guru Pendidikan Kewarganegaraan semakin berat, karena secara langsung maupun tidak langsung globalisasi akan berpengaruh pada pendidikan pada umumnya dan berdampak pada perilaku siswa pada khususnya. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Siswa pada dasarnya tidak mudah untuk menyerap dampak positif dari globalisasi dan siswa apabila tidak memiliki moral dan etikayang baik bisa saja siswa akan lebih mudah terpengaruh dampak negatif dari globalisasi, sehingga perilaku siswa menjadi kurang baik. Tentunya dengan adanya globalisasi tugas guru PPKn untuk membentuk perilaku siswa yang baik tidak mudah. Memang di era global pendidikan harus bisa menyediakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing di era global. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tidak mudah, butuh peran serta dan kerja sama yang baik dari para guru di antara guru PPKn.

Berbagai sumber keteladanan guru PPKn antara lain dengan menunjukkan etos kerja tinggi, memakai pakaian yang rapi, memiliki kecerdasan dan kreatif dalam belajar, datang ke sekolah tepat waktu, memberikan kasih sayang pada peserta didik, mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, menjaga kebersihan, serta memiliki rasa

kepedulian terhadap sesama. Dalam menunjang pembangunan karakter melalui keteladanan harus ditunjang dengan menjalin kedekatan dengan peserta didik. Kedekatan disini dalam artian mampu menciptakan hubungan batin dan keakraban dengan peserta didik sehingga peserta didik berani berkomunikasi dan bahkan berani untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hal-hal yang tidak dipahaminya. Melalui kedekatan antara guru dan peserta didik maka peserta didik akan memahami kebijakan guru, sikap dan perilaku guru dalam memberikan pengajaran sehingga mampu memicu inspirasi dalam diri peserta didik untuk meniru dan membangun karakter dalam diri peserta didik.

Penguasaan Kompetensi Guru PKn Masih Kurang

Di Indonesia pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar demi terbangunnya karakter bangsa, namun selama ini selalu mengalami kendala. Kualitas guru menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik, sehingga proses pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran menjadi terkendala. Surakhmad (2004:1) mengemukakan bahwa “kekuatan dan mutu pendidikan suatu negara dapat dinilai dengan faktor guru sebagai salah satu indeks utama”. Itulah sebabnya mengapa guru merupakan faktor yang mutlak di dalam pembangunan. Makin bersungguh-sungguh sebuah pemerintahan untuk membangun negaranya, semakin urgen kedudukan guru. Kualitas pendidikan di Indonesia ditentukan oleh guru, entah dari segi kualitas maupun pemerataan guru di berbagai wilayah. Di sisi lain, guru Pendidikan Kewarganegaraan juga harus ikut bertanggung jawab apabila kualitas pendidikan di Indonesia semakin menurun, karena Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran dan mata kuliah yang digadang-gadang mampu memperbaiki moral generasi penerus bangsa.

Pada dasarnya permasalahan yang selama ini melingkupi Pendidikan Kewarganegaraan adalah peran guru dalam pembelajaran di kelas, sehingga tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di pendidikan formal belum tercapai dengan maksimal. Guru yang berkualitas seharusnya memiliki 4 kompetensi yang tertuang di dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 10 ayat 1 antara lain:

1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru yang mampu mengelola proses belajar dan mengajar untuk mencairkan suasana di kelas.
2. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam menguasai materi yang diajarkan kepada peserta didik.
3. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik dalam berinteraksi dengan masyarakat, peserta didik atau komponen masyarakat yang lain.
4. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang harus dimiliki oleh guru untuk menjadi pribadi yang religius, tanggung jawab, memiliki komitmen, berintegritas, jujur dan lain sebagainya.

Pembelajaran di kelas, seharusnya guru bukan sebagai sumber belajar yang tahu segalanya, namun selama ini guru merasa seolah-olah mengetahui segalanya sehingga setiap pertanyaan peserta didik yang ditujukan kepada guru selalu dijawab

dengan seandainya oleh guru (dijawab tanpa dasar yang jelas), meskipun jawabannya salah. Hal tersebut bisa terjadi karena guru takut terlihat malu di depan peserta didik, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari peserta didik. Sikap yang seharusnya diambil oleh seorang guru apabila tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan seorang peserta didik, menawarkan kepada peserta didik lainnya untuk didiskusikan, sehingga terjadilah interaksi antara guru dengan peserta didik dan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik.

Kendala-kendala yang dialami Pendidikan Kewarganegaraan tersebut seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi setiap guru khususnya yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas. Kualitas pendidikan di suatu negara pada dasarnya dapat diukur dengan kemampuan dan peran guru. Apabila guru di Indonesia tidak memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik, maka masa depan bangsa Indonesia tidak menentu, karena pemuda yang diajar oleh guru saat ini hanya mampu menguasai pengetahuan saja dan belum memiliki keterampilan dan karakter yang berdasarkan Pancasila.

Kelemahan Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran merupakan proses untuk membentuk pengetahuan, keterampilan dan karakter peserta didik, dalam proses tersebut seorang guru maupun dosen memerlukan persiapan agar dapat mengorganisir di dalam proses pembelajaran sehingga pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu memperhatikan komponen-komponen pengaturan guru dan peserta didik, sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi pokoknya, yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Untuk menanamkan tiga kompetensi tersebut, maka seorang guru harus memiliki strategi dalam proses belajar dan mengajar, karena tanpa strategi seorang guru akan kesulitan untuk membangun ketiga kompetensi tersebut. Strategi pembelajaran selama ini menjadi kendala sebagian besar guru di Indonesia, karena metode yang digunakan selalu monoton, kurang kreatif dan variatif, sehingga kolaborasi antar metode pembelajaran di kelas sangat jarang ditemui.

Pemilihan metode pembelajaran merupakan salah satu strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai, namun selama ini guru selalu menggunakan metode ceramah yang hanya transfer of knowledge, sehingga keterampilan dan karakter peserta didik belum bisa dibangun dengan maksimal. Padahal peran guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga memberikan bimbingan sehingga peserta didik mempunyai jiwa dan watak yang baik, mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Pendidikan Kewarganegaraan yang dulu bernama civic masih menggunakan teknik mengajar yang tradisional, yaitu menggunakan metode ceramah dan indoktrinasi. Metode ceramah adalah metode yang membosankan dalam proses pembelajaran, karena metode tersebut tidak memberikan kesempatan peserta didik untuk berinteraksi dengan teman dan guru.

Kelemahan metode ceramah diidentifikasi Sanjaya (2010:148-149) antara lain sebagai berikut: "(1) Materi yang dapat dikuasai peserta didik sebagai hasil dari ceramah

akan terbatas pada apa yang dikuasai guru; (2) Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme; (3) Guru yang kurang memiliki kemampuan yang bertutur baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan; dan (4) Melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum”.

Metode ceramah dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih sangat kurang berarti dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan kolaborasi antar metode pembelajaran Keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode ini masih sangat kurang, di dalam metode tersebut interaksi sangat jarang ditemui. Fenomena ini menjadi penghalang untuk memunculkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga tidak dipungkiri Indonesia selalu melahirkan pemuda yang kurang kreatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa setiap bangsa dan negara mengakui pentingnya pembangunan karakter nasional dalam upaya mempertahankan eksistensi negara bangsa. PKn merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya nasional, yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa. Upaya pembangunan karakter bangsa dalam lingkup pendidikan tidak terlepas dari peran guru sebagai agen pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pembelajaran yang berusaha untuk membangun civic knowledge, civic skills, dan civic disposition peserta didik, sehingga tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dapat terwujud. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya ujung tombak untuk membangun karakter bangsa peserta didik, karena Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan moral yang mengajarkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu penyelesaian penulisan artikel ilmiah ini dengan baik dan benar serta tepat pada waktunya. Semoga kebaikan yang diberikan nantinya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa serta jika terdapat kesalahan dalam penulisan artikel ilmiah ini, penulis pribadi meminta maaf terhadap semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar negeri bojong 3 pinang.

- Moleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, B. 2017. Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics*, 14 (2), 218-225.
- Muttaqin, M.F., Raharjo, T.J, & Masturi. 2018. The implementation main values of character education reinforcement in elementary school. *Journal of Primary Education*, 7 (1), 130-112.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Pipit, W. 2016. Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik di dalam proses pembelajaran. *Jurnal Civics*, 13 (2), 188-198.
- Reynolds, R., Notari, M., & Tavares, N.J. 2017. Twenty-first century skills and global education roadmaps. ResearchGate.
- Sanjaya, W. (2010). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Singh, B. 2019. Character education in the 21st century. *IJSS*, 15 (1), 1-8.
- Sugara, H., & Mutmainnah, F. (2020). Peran guru ppkn dalam membangun karakter bangsa sebagai respon dan tantangan abad ke-21. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, 16(29), 16-30.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tafese, G.S. 2018. Aseessment of challenges to civics and ethical education in Ethiopian secondary schools. *Journal of Education and Practice*, 9 (4), 16- 20.
- Widiatmaka, P. (2016). Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik di dalam proses pembelajaran. *Jurnal Civics*, 13(2), 188-198.
- Wiwin, P.A. 2017. Peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengembangangan karakter disiplin peserta didik melalui pendekatanSn keteladanan di SMP N2 tegal. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 534-545.